

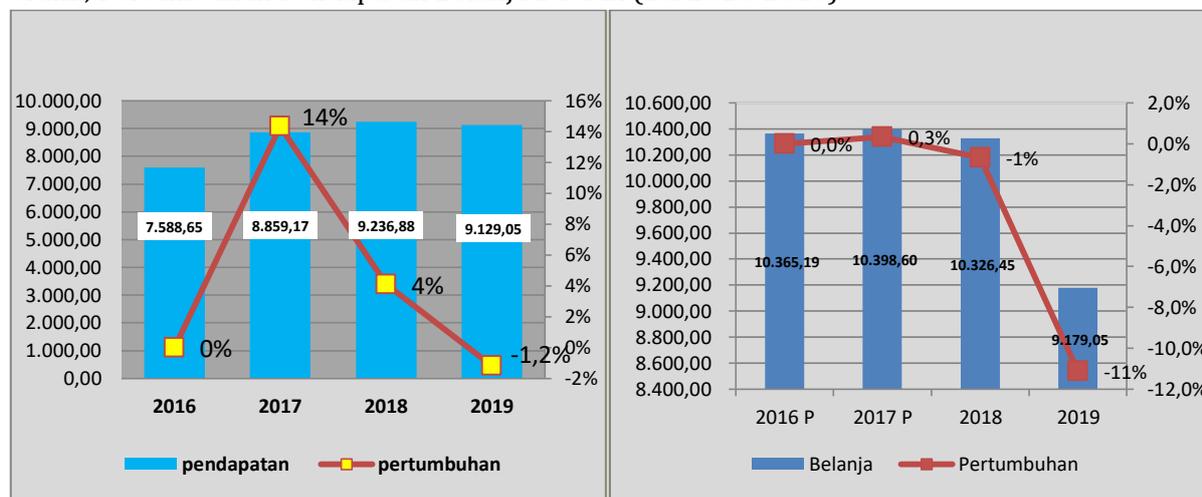
Jenis Berkas	: Pers Rilis	No.	: PR. Februari 02/01 Arsip
Judul	: Refleksi Kebijakan Anggaran Riau	Tanggal	: 27 Februari 2019
Sub Judul	: Bias Untuk Kepentingan Publik	Tahun	: 2019
		Penulis	: *FITRA RIAU*

“Refleksi Kebijakan Anggaran Riau, Bias Untuk Kepentingan Publik”

A. Fluktuasi Pendapatan & Belanja Daerah

Kapasitas fiskal daerah empat tahun terakhir (2016 – 2019) dalam pertumbuhannya mengalami fluktuatif bahkan stagnan pada priode 2018-2019 ini, misalnya pendapatan tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 7,58 triliun, diproyeksikan terus naik tahun 2017 Rp 8,85 triliun, 2018 Rp 9,23 triliun dan tahun 2019 menjadi Rp9,12 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan daerah bersumber dari dana transfer rata – rata 57% dalam empat tahun, justru sektor PAD (Pendapatan Asli daerah) rata-rata 43% cenderung menurun setiap tahunnya, prinsipnya sektor PAD dapat bertambah setiap tahun, seperti pajak rata-rata 81%, retribusi relatif rendah hanya 0,5%, dan lain-lain PAD (hibah, penyesuaian) rata-rata 13% yang cenderung turun setiap tahun, juga dalam pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD tahun 2019 berkontribusi 3,8% turun dari tahun 2018 yang diterima 5,5% dari pendapatan asli daerah.

Grafik; Pertumbuhan Pendapatan Belanja Daerah (Ta. 2016-2019)



Sumber: Dok. APBD Provinsi Riau TA. 2016 – 2019

Belanja daerah terjadi penurunan alokasi setiap tahun dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran transfer pusat tahun 2018 yang cukup signifikan, seharusnya dampak dari penurunan belanja tersebut tidak berpengaruh terhadap belanja kepentingan publik, disamping itu serapan anggaran yang tidak maksimal berdampak tingginya silpa, sehingga proyeksi belanja selalu lebih tinggi dari pendapatan setiap tahunnya. Proyeksi Belanja tahun 2016, 2017 dan 2018 stagnan diangka Rp10,3 triliun, turun signifikan tahun 2019 menjadi Rp 9,17 triliun, secara umum tahun 2019 digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar 55,3 persen, lebih besar dari belanja langsung hanya sebesar 44,7 persen dari total belanja daerah, Artinya lebih besar belanja daerah diprioritaskan untuk membayar gaji pegawai sekitar 29% dari total belanja

daerah, daripada untuk infrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya yang berkenaan demi kesejahteraan masyarakat.

B. Belanja Rutin Sarat Pemborosan, Pemerintah harus Lebih Efisien

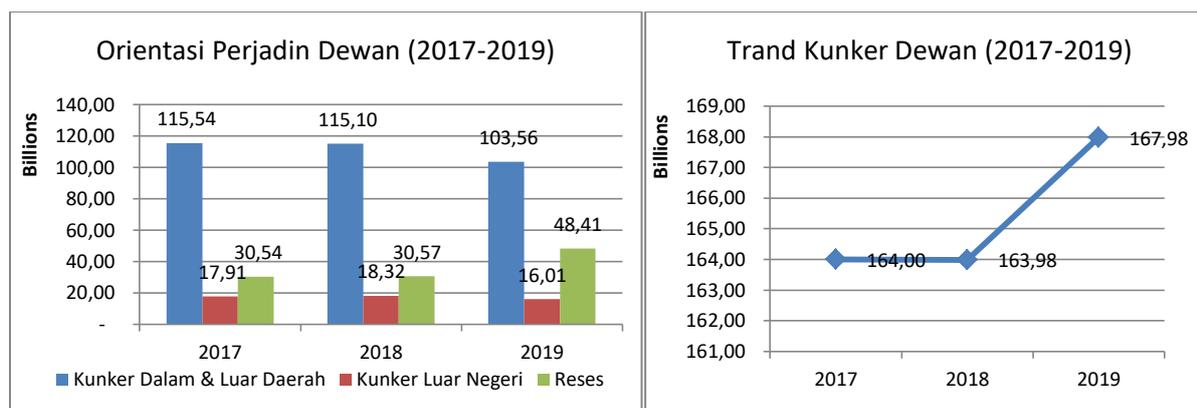
Belanja daerah Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir (2017-2019), dapat dikatakan belum maksimal dalam melakukan penghematan anggaran dalam merencanakan APBD. Hal itu dapat dilihat dari beberapa item anggaran yang tidak efisien. Padahal sebenarnya pemerintah daerah masih dapat menghemat anggaran untuk belanja –belanja tersebut. Misalnya terdapat belanja rutin dalam tiga tahun terakhir, terdapat 8 item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi Riau cukup signifikan. Selain belanja perjalanan Dinas, maka minum, juga ada anggaran lainnya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan, bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah.

Tabel; Trand Alokasi Belanja Rutin Pemda Riau Ta. 2017-2019

No	Jenis Belanja	2017	2018	2019
1	Belanja Perjalanan Dinas	513.188.237.655,00	426.104.283.368	401.800.890.720
2	Belanja Makan dan Minum	173.521.816.382,00	130.789.806.000	145.154.242.350
3	Belanja Publikasi	24.705.881.610,00	17.236.733.750	18.631.339.700
4	Belanja Cetak Pengadaan	53.347.715.100,00	36.825.369.202	32.745.922.010
5	Pengharum Ruangan	2.235.575.000,00	1.909.676.800	1.873.613.200
6	Dekorasi, Dokumentasi, Logistik IRT	51.096.080.748,00	33.047.805.215	23.133.697.746
7	Pakaian Dinas	35.937.144.899,00	42.179.387.998	15.395.332.995
8	Belanja Listrik	55.151.211.675,00	57.387.957.611	60.172.958.321
TOTAL		909.183.663.069,00	745.481.019.944,00	698.907.997.042,00

Sumber : Dok. APBD Provinsi Riau TA. 2017 - 2019

Lebih lanjut, pemborosan belanja cukup besar digunakan untuk perjalanan dinas, seperti tahun 2019 sebesar Rp401 milyar, meskipun anggaran perjalanan dinas menurun setiap tahunnya, namun anggaran perjalanan dinas untuk DPRD Riau meningkat ini menjadi Rp167 milyar dari tahun sebelumnya Rp163 milyar tahun 2018, Artinya pemerintah Provinsi dalam tiga tahun pemerintah hanya berani mengurangi belanja perjalanan dinas untuk pemerintah atau eksekutif, sementara tidak berani mengurangi perjalanan dinas di DPRD atau legislatif. Seharusnya efisiensi anggaran harus dirasionalisasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.



Sumber; Dok. APBD Riau 2017-2019- Diolah Fitra

Sebenarnya jika anggaran diatas direncanakan lebih efisien maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi”. Salah satu yang mesti harus di efisienkan lebih adalah, seperti Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah harusnya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas, hampir semua kegiatan yang ada di APBD, seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah. Meskipun jika dilihat dari tujuan kegiatan tersebut untuk dilakukan didalam daerah. akan tetapi tertera alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah.

Tabel; Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Ta. 2017-2019)

Jenis Belanja	2017	2018	2019
Penyediaan Makan Dan Minum Gubernur	3.900.000.000,00	3.884.960.000,00	3.802.960.000,00
Penyediaan Makan Dan Minum Wakil Gubernur	3.200.000.000,00	3.182.080.000,00	3.160.680.000,00
Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur	1.200.000.000,00	947.500.000,00	943.400.000,00
Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur	1.000.000.000,00	762.250.000,00	762.250.000,00
Total	9.300.000.000,00	8.776.790.000,00	8.669.290.000,00

Sumber; Dok. APBD Riau 2017-2019 – Diolah Fitra

Begitu juga dengan belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil , terutama untuk kebutuhan makan minum dan pelayan rumah tangga dianggarkan cukup signifikan, seperti tahun 2019 sebesar Rp8,6 milyar, meskipun turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp8,7 milyar, hanya mampu di hemat sebesar Rp107 juta atau 1 persen.

C. Belanja Wajib Minim Orientasi

Urusan Kesehatan

Dari angka Rp9,17 triliun belanja daerah yang ditetapkan tahun 2019 ini, anggaran yang dialokasikan untuk untuk membiayai urusan kesehatan daerah “diluar” gaji pegawai sebesar Rp. 1,11 triliun. Artinya, alokasi anggaran kesehatan tahun 2019 di luar gaji adalah 12,09% dari total belanja daerah yang ditetapkan, artinya secara proporsi alokasi anggaran kesehatan sudah memenuhi amanat pasal 171 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu minimal 10% dari total



belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut terdapat pada 6 (enam) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu, Dinas Kesehatan Rp. 266 Milyar, RSUD Arifin Ahmad Rp. 607,9 Milyar, RSJ Tampan Rp. 122,4 Milyar, RS Petal Bumi Rp. 88,9 Milyar, Dinas Kependudukan Rp. 1,82 Milyar, Sekretariat Daerah Rp. 318 juta, dan dana hibah bidang kesehatan Rp. 2,47 milyar.

Sumber; Dok. APBD Riau 2017-2019 – Diolah Fitra

Namun, besaran anggaran kesehatan tersebut harus berorientasi pada prioritas untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam yang dianggarkan dalam APBD (mandat pasal 171 UU kesehatan).

Kepentingan pelayanan publik tersebut meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. “Artinya, sebesar Rp740 milyar dari total Rp1,11 triliun alokasi anggaran kesehatan harus digunakan untuk pelayanan publik, seperti sosialisasi/pengumuman layanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pengurangan penderitaan penyakit, pengendalian penyakit dan pemulihan atau rehabilitasi penderita penyakit berat.

Urusan Pendidikan;

Begitu juga urusan pendidikan, sebagaimana amanat UU Pendidikan, minimal harus mengalokasikan sebesar 20% diluar gaji dari total belanja daerah. Tahun 2019 ini, alokasi pendidikan sebesar Rp2,12 triliun atau sama dengan 23% dari total belanja sebesar Rp9,17 triliun. Meskipun orientasi belanja pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti pembangunan ruang kelas belajar, pustaka, laboratorium dan sarana penunjang siswa. Dari angka Rp2,12 triliun tersebut, dilaksanakan 5 OPD, diantaranya Dinas Pendidikan Rp1,02 triliun, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp35,9 milyar, Dinas perpustakaan dan arsip Rp12,4 milyar, Badan Penelitian dan pengembangan Rp6,2 milyar dan Dinas Kominfo Rp 95 juta, dan terdapat hibah BOS ke daerah sebesar Rp1,04 triliun.

Tabel; Alokasi Anggaran Pendidikan – Tahun 2019

No	Uraian Belanja	Alokasi 2019
1	Belanja Barang Jasa	641.971.926.485
2	Belanja Modal	433.694.088.410
3	Belanja Hibah Bos	1.045.876.800.200
	Total Belanja Pendidikan	2.121.542.815.095
	Total Belanja Daerah	9.179.049.316.920
	Persentase	23%

Sumber; Dok. APBD Provinsi Riau – 2019

Meskipun secara proporsi mencapai 20%, tetapi setelah dikurangi alokasi hibah BOS ke daerah, anggaran pendidikan hanya 12% yaitu untuk belanja barang jasa sebesar Rp641 milyar dan belanja modal sebesar Rp433 milyar. Lebih detail alokasi belanja pendidikan untuk pendidikan untuk infrastruktur pendidikan hanya sebesar Rp49,9 milyar, beasiswa (Bidik Misi, PT dalam dan luar daerah) Rp46,6 milyar, peningkatan mutu pendidik Rp240 milyar, penyelenggaraan BOS Rp242,6 milyar, dan selebihnya untuk penunjang urusan pendidikan pada OPD terkait.

D. Rekomendasi;

- Fitra Riau menilai, bahwa kondisi tersebut menunjukkan semangat efisiensi anggaran pemerintah belum tercermin dalam perencanaan anggaran daerah. Masih banyak anggaran yang dialokasi secara berlebihan, sangat berpotensi menjadi ruang korupsi, apalagi anggaran – anggaran tersebut merupakan anggaran habis pakai yang sangat mudah untuk di selewengkan.
- Urusan wajib kesehatan dan pendidikan, yang perlu diperhatikan adalah orientasi belanja tersebut benar-benar dapat termanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat tidak mampu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Bukan hanya sebatas untuk memenuhi proporsi belanja yang ditetapkan perundang-undangan.
- Untuk itu, Gubernur Riau perlu melakukan evaluasi kembali atas perencanaan anggaran APBD terutama untuk tahun 2019 ini, yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya pemerintah perlu memperketat penggunaan anggaran terutama anggaran perjalanan dinas dan anggaran – anggaran lain yang berpotensi boros dan tidak berorientasi pada tujuan pembangunan daerah.